



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI MELALUI BELANJA MODAL  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
DI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**MURTI FADILLAH**  
NPM 1615210006

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat, dimana dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Sumatera Utara*". Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data times series dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0, maka pendapatan asli daerah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dana alokasi umum berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dan berdasarkan penelitian analisis jalur, maka hasil dari pengolahan data bahwa nilai pendapatan asli daerah berpengaruh langsung lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak melalui belanja modal. Sedangkan untuk nilai dana alokasi umum berpengaruh langsung lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak melalui belanjanya yang sebagai variabel interveningnya.

## ***ABSTRACT***

This study aims to look at the effect of independent variables on variables, entitled "Regional Original Revenue Funds and General Allocation Funds for the Economy Through Capital Expenditures as Intervening Variables in North Sumatra". In this study, researchers used a series of data from 2013 to 2018. Based on the results of data processing using the SPSS application version 16.0, regional original income can be used for significant economic growth. General funds are channeled directly to significant economic growth. And based on path analysis research, the results of processing the original value-added data directly greater regional economic growth not through capital expenditure. Meanwhile, the value of general participation funds is greater for economic growth, but not through capital expenditure, which is an intervening variable.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identitas Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
F. Keaslian Penelitian.....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori.....	8
1. Pendapatan Asli Daerah .....	8
2. Dana Alokasi Umum.....	12
3. Belanja Modal .....	13
4. Pertumbuhan Ekonomi.....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	21
C. Kerangka Konseptual .....	24
D. Hipotesis .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
C. Definisi Operasional Variabel.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
E. Teknik Analisis Data.....	30
1. Uji Normalitas.....	31
2. Uji Multikolinieritas .....	32
3. Uji Autokorelasi .....	33

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	36
1. Sejarah Perkembangan Sumut.....	36
2. Perekonomian Di Sumatera Utara.....	39
B. Hasil Penelitian .....	41
1. Deskriptif Penelitian.....	41
2. Uji Normalitas.....	42
3. Uji Multikolinieritas.....	44
4. Uji Autokorelasi.....	45
5. Analisis Jalur.....	45
C. Pembahasan.....	59
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	59
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	59
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal.....	60
4. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal.....	60

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	61
B. Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Variabel Bebas Dan Terikat Di Sumatera Utara.....	3
1.2 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya .....	7
3.1 Tabel Skedul Proses Penelitian .....	28
4.1 Tabel Statistik Deskriptif .....	42
4.2 Tabel Hasil Uji Multikolinieritas .....	44
4.3 Tabel Hasil Uji Autokorelasi .....	45
4.4 Tabel Hasil Persamaan Aplikasi 1 .....	45
4.5 Tabel Hasil Persamaan Aplikasi 2 .....	46
4.6 Tabel Persamaan Aplikasi 3.....	47
4.7 Tabel Persamaan Aplikasi 4.....	48
4.8 Tabel Persamaan Pertama .....	49
4.9 Tabel Persamaan Pertama .....	49
4.10Tabel Persamaan kedua.....	50
4.11Tabel Persamaan Kedua.....	51

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Konseptual .....	24
4.1 Gambar Grafik Histogram.....	43
4.2 Gambar Kurva P-P Plot.....	43
4.3 Gambar Path Analisis Pengaruh Antara Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi.....	54
4.4 Gambar Path Analisis Pengaruh Antara Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi .....	57

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Sumatera Utara”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Strata Satu (S-1), Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam laporan skripsi ini penulis tidak luput dari kendala-kendala dalam mengerjakan penyusunan laporan skripsi tersebut. Namun kendala tersebut masih bisa diatasi oleh penulis dengan adanya bantuan, bimbingan dan juga dukungan berbagai pihak terkait, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak tersebut yaitu:

1. Bapak H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Bapak Bakhtiar Efendi, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak Drs. H Kasim Siyo., M.Si.Ph.D sebagai dosen pembimbing I laporan skripsi penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Ibu Diwayana Putri Nasution, SE., M.Si. sebagai dosen pembimbing II laporan skripsi dalam memberikan masukan dan saran untuk penulisan dan perbaikan skripsi untuk penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Terima kasih kepada kedua Orang Tua yang telah membari kasih sayang dan perhatian, cinta dan dukungan baik moral maupun materi yang tak ternilai dan tidak terbalaskan.
7. Terima kasih kepada Saudara-saudari dari keluarga besarku yang telah memberikan doa dan dukungan maupun memberikan semangat bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan juga doa .
9. Terima kasih buat kakek H. Achmad Zaini yang telah membantu memberikan materi maupun moral dan dukungan dalam mengerjakan Skripsi ini, sehingga peneliti dapat bersemangat dan berjuang untuk menyelesaikan semua tugas akhir kuliah ini.
10. Terima kasih buat Andri Kurniandy Harada selaku motivator besar dan penting dalam segala hal yang telah memberikan bantuan atas barang dan juga perhatian serta kasih sayang yang begitu besar sehingga berpengaruh besar terhadap peneliti untuk mengerjakan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini disampaikan kepada pihak terkait dan si pembaca. Semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi si pembaca agar guna mendapat penambahan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan referensi kepada penelitian selanjutnya.

Medan, 21 Februari 2020

Penulis

**Murti Fadillah**  
**NPM: 1615210006**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban dari semua orang yang dikutip dari pajak dan pendapatan yang dapat dinilai dari uang dan barang yang bisa dijadikan kekayaan dari daerah itu sendiri sepanjang belum dimiliki oleh Negara maupun daerah yang lebih tinggi maupun dari pihak-pihak yang terkait dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembahasan pengelolaan keuangan tidak lepas dari pembahasan otonomi daerah yang dimana otonomi daerah merupakan suatu daerah khusus atau istimewa yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya sendiri guna untuk kemandirian dan memakmurkan serta mensejahterakan masyarakat dan daerah itu sendiri. Dalam sistem kelembagaan pemerintah daerah, DPRD adalah sebagai pemegang kedaulatan rakyat berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD dari segala tindakan dan kegiatan yang telah di tentukan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) “Anggaran Pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Pasal 1 ayat (2) “Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penerapan APBD”.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri”. Pendapatan asli daerah terbagi menjadi beberapa bagian yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah dihimbaukan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah agar pemerintah bisa memberikan kualitas pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi.

Menurut penelitian Azhari (2019:3), “setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fisik antara satu daerah dengan daerah lainnya”. Dalam mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah mengalokasikan dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar mendanai kebutuhan daerah dan melaksanakan desentralisasinya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pemerintah daerah agar melakukan pembangunan dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan bersama masyarakat wilayah itu sendiri. Di Sumatera Utara banyak terdapat daerah yang bisa dijadikan pemasukkan atau pendapatan daerah itu sendiri baik dari sumber daya alamnya maupun dari pengolahan sumber daya alamnya yang dijadikan objek wisatawan asing mau pun lokal. Sehingga danau, bukit, taman dan juga gunung ataupun sumber daya alam lainnya dapat dinikmati semua orang. Sehingga bisa dijadikan daya tarik investasi asing dalam penanaman modal yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut dan meningkatkan pertumbuhannya di Sumatera Utara. Namun apabila

pendapatan asli daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga pasti meningkat dan akan menarik investor luar maupun dalam negeri untuk bergabung membuka bisnis atau usaha mereka di Indonesia maupun di daerah Sumatera Utara sendiri. Dan dimana akan membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia baik dalam pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dalam kepentingan masyarakat dan Negara.

**Tabel 1.1 Variabel Bebas dan Terikat di Sumatera Utara**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)</b>	<b>Dana Alokasi Umum (Miliar Rupiah)</b>	<b>Belanja Modal (Miliar Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (Ratusan Juta Rupiah)</b>
<b>2013</b>	4.091.285.888.816	1.223.445.404.000	760.722.418.737	469.464.020.000
<b>2014</b>	4.416.811.865.267	1.349.132.276.000	1.145.972.228.647	521.954.950.000
<b>2015</b>	4.883.880.619.308	1.139.261.371.000	932.244.349.249	571.722.010.000
<b>2016</b>	4.954.833.100.869	1.604.505.673.000	1.019.855.142.610	628.394.160.000
<b>2017</b>	4.925.627.725.733	2.638.744.012.480	1.790.920.557.785	684.069.490.000
<b>2018</b>	5.638.960.579.479	2.629.224.545.000	1.564.903.232.653	741.192.90.000

*Sumber : Kementerian Keuangan Sumatera Utara dan BPS, 2019*

Pada tabel diatas, bisa dilihat bahwa pendapatan asli daerah terus meningkat setiap tahunnya namun pada jumlah dana alokasi umumnya terdapat penurunan di tahun 2015 sebesar Rp. 209.870.905, untuk belanja modal terdapat penurunan di tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 931.098.377. pada tahun 2017 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 29.205.375.1 dengan dana alokasi 2.638.744.012.480. Dimana adanya penurunan pendapatan asli daerah ditahun 2017 tetapi dana yang dikeluarkan untuk dana alokasi umum lebih besar di tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2018 belanja modal menurun sebesar Rp. 226.017.325.1, dimana terdapat naiknya pendapatan asli

daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi dan tidak untuk belanja modal.

Berdasarkan fenomena masalah diatas penting untuk diteliti pada pertumbuhan ekonomi di sektor jasa oleh sebab itu penelitian ini di beri judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Sumatera Utara”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari pembahasan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah namun pada Dana Alokasi Umum dan Belanja modal yang mengalami penurunan di tahun 2015 di Sumatera Utara.
2. Penurunan Pendapatan Asli Daerah di tahun 2017, namun Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya di Sumatera Utara.
3. Naiknya jumlah Pendapatan Asli daerah, Dana alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2018 tetapi untuk belanja modalnya mengalami penurunan yang lebih besar di bandingkan tahun-tahun sebelumnya di Sumatera Utara.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, pertumbuhan ekonomi dilihat dari Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel interveningnya. Yang dilakukan di Sumatera Utara dalam penelitian ini pada tahun 2013 sampai 2018.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari hasil pembahasan latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Sumatera Utara?
4. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Sumatera Utara?

### **E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Sumatera Utara.
- d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Sumatera Utara.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat penelitian ini untuk melatih diri peneliti dalam membuat penelitian yang berguna untuk memberi masukan dalam mengelola APBD permasalahan yang dihadapi daerah tersebut.
- b. Menjadi jurnal yang merekombinasi bagi instansi terkait.
- c. Sebagai bahan referensi bagi para akademis atau peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian dibidang permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

## **F. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Taufiq Muji Prawira) dengan skripsi judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Sumatera Utara”.

**Tabel 1.2 Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya**

<b>Perbandingan</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Penelitian sekarang</b>
Judul	Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Sumatera Utara
Variabel	variabel bebas: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Belanja Daerah variabel terikat: Pertumbuhan Ekonomi	variabel bebas: 1. Pendapatan asli daerah 2. Dana alokasi umum variabel terikat: Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi
waktu penelitian	tahun 2018	tahun 2019
lokasi penelitian	Indonesia	Sumatera Utara
metode analisis	Regresi Linier Berganda dan Time Series	Path Analysis

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah yaitu hasil dari pendapatan sumber daya alam maupun sumber ekonomi lainnya, yang diterima oleh badan keuangan pemerintah daerah untuk disimpan dan digunakan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Pendapatan asli daerah ini mempunyai tujuan kepada pemerintah daerah untuk membiayai otonomi daerah dalam kemampuan dari pengurusan wilayah masing-masing guna kepentingan masyarakat dan wilayah daerah tersebut, agar lebih baik dan lebih sejahtera masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 “Pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri”. Menurut Aditya Prasetyo (2018), “Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

Menurut Prawira (2018), “Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhan sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri”. Ada beberapa sumber pendapatan asli daerah dari potensi daerah tersebut yaitu sebagai berikut:

### **a. Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi daerah yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat dipaksakan berdasarkan undang-undang untuk tidak dapat minta imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). Ada beberapa macam-macam pajak daerah yang dipungut dari pemerintah kabupaten/kota yaitu: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak izin mendirikan bangunan, Pajak parkir, pajak jalan tol, pajak listrik, pajak tanah dan lainnya.

Selain itu ada macam-macam pajak lainnya yang berdasarkan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu pajak dari sumber pendapatan daerah itu sendiri dan pajak sebagai alat pengatur lainnya yang hanya di pengang oleh Negara.

### **b. Retribusi Daerah**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Retribusi adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi mempunyai 3 bagian yaitu:

#### 1) Retribusi Jasa Umum

Merupakan jasa yang diberikan dari pemerintah daerah untuk kepentingan bersama maupun pribadi yang dapat dirasakan dan dinikmati.

#### 2) Retribusi Jasa Usaha

Merupakan jasa yang diberikan dari pemerintah daerah yang menggunakan prinsip komersial yang diberikan dari sektor swasta.

3). **Retribusi Perizinan Tertentu**

Merupakan suatu kegiatan pemerintah daerah atas pemberian izin untuk orang pribadi dan badan guna pembinaan, pengendalian maupun pengawasan dari kegiatan. Atas pemanfaatan ruang, fasilitas tersebut dan berguna untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar daerah tersebut tanpa harus merusaknya.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan**

Diakibatkan dari berlakunya otonomi daerah dan juga kekayaan sumber daya alam yang begitu besar. Sehingga pemerintah harus campur tangan untuk mengelola kekayaan daerah dan sumber daya manusia maupun sector industri yang ada. Otonomi daerah dapat mengelola kekayaannya sekuat dan seoptimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu. Dalam undang-undang juga mengizinkan pemerintah daerah mendirikan BUMD, sektor swasta dan pengusaha daerah dapat memberikan bantuan bagi daerah tersebut dan membuat mandiri daerah itu dalam mengelola pembangunan perekonomian daerah sampai makmur dan maju.

Macam-macam pendapatan terdiri dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- 1). Laba atas modal perusahaan milik daerah atau badan usaha milik daerah tersebut.
- 2). Laba terdiri dari penyertaan modal perusahaan milik Negara dan badan usaha milik Negara (BUMN) tersebut.
- 3). Laba dari penyertaan modal perusahaan milik swasta daerah tersebut.

#### **d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Digunakan sebagai membiayai belanja daerah dan diupayakan dari daerah, dengan cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku, dalam pendapatan ini dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat dari pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan ataupun pinjaman untuk masyarakat daerah tersebut. Dimana bisa dapat menerbitkan obligasi daerah itu sendiri.

Menurut Prawira (2018), “Pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Adapun beberapa macam pendapatan yang meliputi objek pendapatan yaitu :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah tersebut.

Dalam menjalankan otonomi daerah sering kali mengalami hambatan dalam pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah bisa naik meningkat bisa juga menurun diakibatkan dari faktor pendapatan ekonomi ataupun potensi ekonomi. Sehingga seringkali pemerintah jadi memiliki derajat kebebasan dalam mengelola keuangan daerah tersebut.

## 2. Dana Alokasi Umum

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2004), “Transfer atau grants dari pempus secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni matching grant dan non matching grant, kedua grants tersebut digunakan oleh Pemda untuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terus menerus untuk setiap tahun fiskal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik (contoh : belanja gaji dan honorarium pegawai). Sementara belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik, seperti jalan, jalan bebas hambatan, jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum sebagainya. Belanja pembangunan non fisik diantaranya mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan keamanan masyarakat”.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 290 ayat (1) “Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Azhari (2019), “berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan transfer yang cukup signifikan di dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara leluasa dapat digunakan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat”.

Dana Alokasi Umum merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonomi, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota yang di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana alokasi umum ialah salah satu komponen belanja untuk APBN dan menjadi salah

satu komponen sebagai pendapatan pada APBD. Dana alokasi umum dialokasikan untuk provinsi, kabupaten, dan kota di tetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Hitungan Dana Alokasi umum untuk provinsi, kabupaten dan kota dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dalam provinsi, kabupaten dan juga kota.

Adapun tujuan dari transfer dana alokasi umum yaitu sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum terdiri dari dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan dana alokasi umum untuk daerah kabupaten ataupun kota. Dalam pembagian Dana alokasi umum antar provinsi, kabupaten dan kota sebesar 10% dari total dana alokasi umum nasional yang dialokasikan kepada provinsi, sedangkan 90% dari total dana alokasi umum nasional yang dialokasikan untuk kabupaten ataupun kota.

### **3. Belanja Modal**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, “Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah”.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 2 Peraturan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Menurut Halim (2012), “Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan”.

Menurut Prasetyo (2018), “mengatakan bahwa ketimpangan ekonomi diantara provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya”.

Menurut Azhari (2019), “Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi penerimaan yang baru”. Belanja modal mempunyai tiga cara agar mendapatkan aset tetap yaitu sebagai berikut:

1. Dengan membangun sendiri.
2. Menukarkan dengan aset tetap lainnya.
3. Membeli aset tetap.

Adapun beberapa jenis belanja modal dan beserta komponen-komponenya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

- Belanja Modal Tanah
  - Belanja modal pembebasan tanah

- Belanja modal pembayaran honor tim tanah
- Belanja modal pembuatan sertifikat tanah
- Belanja modal pengurungan dan pematangan tanah
- Belanja modal biaya pengukuran tanah
- Belanja modal gedung dan bangunan
  - Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan
  - Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis gedung dan bangunan
  - Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan
  - Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan
  - Belanja modal perizinan gedung dan bangunan
  - Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan
  - Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan
- Belanja modal peralatan dan mesin
  - Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin
  - Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis peralatan dan mesin
  - Belanja modal sewa peralatan dan mesin
  - Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin
  - Belanja modal perizinan peralatan dan mesin
  - Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin
  - Belanja modal honor perjalanan peralatan dan mesin
- Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

- Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan
- Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengola teknis jalan dan jembatan
- Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan
- Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan
- Belanja modal perizinan jalan dan jembatan
- Belanja modal pengosongan dan pembongkaran penggunaan lama jalan dan jembatan
- Belanja modal honor perjalanan jalan, dan jembatan
- Belanja Modal bahan baku irigasi dan jaringan
- Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengola teknis irigasi dan jaringan
- Belanja modal sewa peralatan irigasi dan jaringan
- Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan
- Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan
- Belanja modal pengosongan dan pembongkaran penggunaan lama jalan dan jembatan
- Belanja modal honor perjalanan irigasi dan jaringan
- Belanja modal dan fisik lainnya
  - Belanja modal bahan baku fisik lainnya
  - Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengola teknis fisik lainnya
  - Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya
  - Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik lainnya
  - Belanja modal perizinan fisik lainnya

- Belanja modal jasa konsultan fisik lainnya

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Badan Pusat Statistik (2010:1), “Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat”. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), “Pertumbuhan ekonomi merupakan jumlah nilai tambah barang atau jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan suatu daerah”.

Menurut Prawira (2018:3), “Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian”.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Product Domestic Regional Bruto setiap tahunnya PDRB diukur atas dasar harga konstan suatu daerah (Ulfi Maryati dan Endrawati, 2010).

Menurut Putu Ngurah Panji Kartika Jaya Dan A.A.N.B Dwirandra (2014), “Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian

dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat”.

Menurut Simon Kuznet, dalam buku pembangunan ekonomi di dunia ke tiga “Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada kedudukannya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan”.

Menurut M.P Todaro, dalam buku ekonomi pembangunan “Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar”. Pelaksanaan otonomi daerah tercapai melalui pertumbuhan ekonomi di sebabkan dengan adanya memberikan keleluasaan pada pemda untuk mengurus atau mengembangkan dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Adapun pertumbuhan ekonomi daerah dapat diprokasikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB itu merupakan totalitas dari keseluruhan nilai barang dan jasa yang didapat dari seluruh kegiatan perekonomian daerah itu sendiri dan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut dapat dihitung melalui PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses kondisi perekonomian suatu Negara untuk menuju keadaan yang lebih baik selama dalam periode tertentu dan pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian guna untuk mewujudkan kenaikan pendapatan nasional di dalam Negara atau daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi

menunjukkan produksi barang atau jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, apabila semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan semakin cepat proses penambahan output wilayah tersebut. Sehingga prospek perkembangan wilayah akan baik dan agar diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka akan dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan wilayah tersebut kearah kemakmuran.

Perhitungan produk domestik regional bruto dibedakan menjadi dua macam yaitu, PDRB pada dasar harga yang merupakan suatu nilai tambah atas barang dan jasa yang dapat dihitung dengan menggunakan harga berlaku pada tahun yang berjalan setiap tahunnya guna dapat melihat pergeseran dan struktur ekonomi tersebut. Namun untuk PDRB pada dasar harga konstan nilai tambah barang dan jasa bisa dihitung menggunakan harga berlaku oleh tahun tertentu sebagai tahun dasar yang dipergunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada tahun ke tahun tersebut.

Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari pendapatan, pajak, investasi dan inflasi. Jika pendapatan meningkat, pajak naik, investasi pasti akan turun inflasi meningkat ini kan membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Karena dengan sedikitnya investasi pasti akan berpengaruh pada pendapatan seseorang maupun perusahaan yang akan berdampak pada suatu Negara maupun daerah yang dimilikinya. Namun pertumbuhan ekonomi dalam sektor jasa tidak berupa barang yang diperjual belikan akan tetapi jasa bisa juga diperjual belikan berupa guru, karyawan, asuransi, travel dan lainnya, dalam sektor jasa ini bisa meningkatkan potensi pada SDM di Indonesia karena banyak sekali yang membutuhkan tenaga kerja manusia dalam berbisnis maupun lembaga-lembaga instansi pemerintahan

sehingga ini akan berpengaruh kepada pengangguran. Dengan banyaknya jasa yang di gunakan maka akan mengurangi pengangguran serta menambah pendapatan Negara Indonesia.

Menurut Azhari (2018), “menyatakan bahwa perhitungan produk domestik regional bruto dapat dilakukan dengan tiga pendekatan meode langsung yaitu:

- a. Pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi output dari masing-masing sektor ekonomi dengan biaya antarannya. Pendekatan ini merupakan pendekatan nilai tambah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi dari input. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.
- b. Pendekatan pendapatan adalah nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha seperti bunga, sewa tanah dan keuntungan. Metode pendapatan ini banyak digunakan pada sektor pemerintahan seperti jasa.
- c. Pendekatan pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa di wilayah domestik. Produk regional domestik dihitung dengan cara menghitung komponen pengeluaran akhir yang

membentuk produk domestik regional bruto. Secara umum pendekatan ini dilakukan dengan cara :

- a. Metode pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang dan metode penjualan eceran.
- b. Metode pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survey pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran belanja, metode *blance sheet*, metode statistik perdagangan luar negeri”.

## B. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Universitas/Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil
1.	Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	X1 = PAD X2 = DAU Y = KD Z =PDB	Regresi Liner Berganda dan Perluasan Analisis Jalur	PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, sedangkan DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, sedangkan PAD,DAU dan Kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.	Ulfi Maryati, Se. M. Ak. Ak Dan Endrawati, Se. M. Kom. Ak (2010) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat.	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK Y = PDB	Teknik Analisa Deskriptif Dan Teknik Analisa Data Inferensial	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Taufiq Muji Prawira (2018) Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan	X1 = PAD X2 = BD Y = PDB	Regresi Linier Berganda dan Time	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dimana

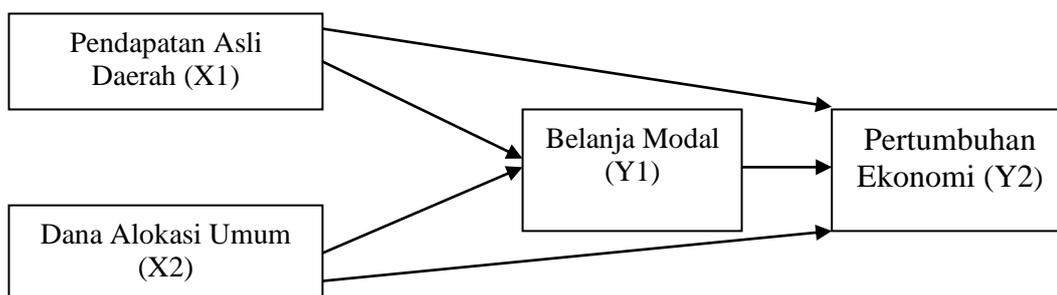
	Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia		Series	semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
4.	Wina Azhari (2019) Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara	X1 = PDB X2 = PAD X3 = DAU Y = BM	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan ekonomi signifikan secara parsial terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal. PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.
5.	Aditya Prasetyo (2018) Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Panca Budi Analisis Flaypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara	X1 = DAU X2 = PAD Y = BM	Regresi Linier Berganda	Ada pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama (simultan) citra merek, citra perusahaan dan promosi penjualan terhadap kepuasan pelanggan. Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial citra merek, citra perusahaan dan promosi penjualan terhadap kepuasan pelanggan.
6.	Kesit Bambang Prakosa (2004) Fakultas Ekonomi universitas Islam Indonesia Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY	X1 = DAU X2 = PAD X3 = PJD Y = BM	Regresi Sederhana dan Regresi Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan untuk model prediksi BJD. Daya prediksi DAU terhadap BJD tetap lebih tinggi dibandingkan dgn prediksi PAD. Karena hal ini menunjukkan terjadinya Flay Paper Effect pada variabel tersebut.

7.	Dina Apriana Dan Rudy Suryanto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	X1 = BM X2 = PAD X3 = KM Y = PDB	Rumus CHIINV dan Path Analysis	Pendapatan asli daerah mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, namun PAD masih sangat kecil dibandingkan komposisi DAU dari pemerintah pusat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.
8.	Putu Ngurah Panji Kartika Jaya Dan A.A.N.B Dwiranda (2014) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD) Bali, Indonesia Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi	X1 = PAD X2 = BM Y = PDB	Pemoderasi	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal di kabupaten atau kota provinsi bali. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi untuk pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal di kabupaten atau kota provinsi bali.
9.	Putu Gde Mahendra Putra Dan I Gusti Ketut Agung Ulupui Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD) Bali, Indonesia Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK Y = IPM	Regresi Linier Berganda	Hasil pengujian meunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM
10.	-Marwarni -Darwanis -Syukriy Abdullah (2013) Magister Akuntansi Pasca Sarjana, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Fakultas Ekonomi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)	X1 = PAD X2 = DAU Y1 = BM Y2 = PDB	Path Analisis	Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

*Sumber: Diolah dari penulis, 2019*

### C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa variabel yang terkait antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian yang akan di teliti nantinya. Agar mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut dan yang akan di teliti untuk di wilayah Sumatera Utara. Adapun kerangka konseptual yang digambarkan di bawah berikut ini:



*Gambar 2.1 kerangka konseptual*

Dari gambar di atas, menunjukkan bagaimana adanya pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal, yang nantinya variabel mana yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat apakah Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal atau Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sebagaimana yang diketahui Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu tujuan dari pemerintah daerah agar dapat membangun daerahnya serta mengelola sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut guna untuk memajukan dan sejahterakan masyarakat di wilayah tersebut.

Sedangkan Belanja modal merupakan pembelian yang digunakan dari Pendapatan asli daerah yang dikeluarkan untuk membeli atau menambah aset tetap dan aset lainnya guna untuk memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat wilayah tersebut. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik seperti sarana dan prasarana dalam kegiatan masyarakat sehari-hari secara terpenuhi dan kendali serta memajukan perekonomian daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN. Yang dialokasikan untuk membiayai pemerataan keuangan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi di daerah wilayah khususnya untuk wilayah Sumatera Utara yang akan di teliti nantinya dengan mengambil data laporan APBD.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang akan diteliti untuk diuji kebenarannya dengan melihat hasil pengelolaan dari data yang diambil dan dijadikan sampel dalam masalah penelitian ini. Adapun beberapa hipotesis didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.
2. Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

3. Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Sumatera Utara.
4. Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Sumatera Utara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian asosiatif/kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

Menurut Rusiadi (2014:12), “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”. Dalam pendekatan penelitian ini untuk mendukung data kuantitatif digunakan metode Path Analysis.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di provinsi Sumatera Utara. Dengan mengambil data pengolahan dari website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	2019															
		Agustus			September			Oktober			November			Desember			
1.	Pengajuan Judul	■															
2.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■										
3.	Seminar Proposal							■	■	■							
4.	Perbaikan Acc Proposal									■	■	■					
5.	Pengolahan Data											■	■				
6.	Penyusunan Skripsi											■	■	■			
7.	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■		
8.	Sidang Meja Hijau																■

Sumber : Diolah Penulis, 2019

### 1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dari pemerintahan di provinsi Sumatera Utara tersebut.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) yang berasal dari laporan keuangan pemerintah di provinsi Sumatera Utara dari tahun 2013-2018 pada periode data tersebut.

### C. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang dioperasikan dalam penelitian ini adalah variabel yang terkandung hipotesis yang telah dirumuskan. Untuk memberikan jawaban yang jelas, maka perlu diberikan definisi variabel-variabel yang akan diteliti guna memudahkan pembuatan pengolahan data sebagai berikut:

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. (UU No 23 Tahun 2014)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rasio
Dana Alokasi Umum (X2)	Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No 23 Tahun 2014 Pasal 290 Ayat (1))	Jumlah Dana Alokasi Umum	Rasio
Belanja Modal (Y1)	Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Pernyataan Standar Akuntansi No 2 Peraturan Republik Indonesia)	Jumlah Belanja Modal	Rasio

	No 71 Tahun 2010)		
Pertumbuhan Ekonomi (Y2)	Jumlah nilai tambah barang atau jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan suatu daerah. (BPS, 2010)	PDRB Harga Konstan	Rasio

*Sumber : Diolah Penulis, 2019*

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan dokumentasi dari website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) yang disatukan dan diolah data dari informasi terdahulu atau jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk diteliti.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan yaitu Path Analysis (Analisis Jalur) dimana analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah Pertumbuhan Ekonomi menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung belanja modal yang dilihat dari variabel yang relevan dengan persamaan sebagai berikut:

1. Persamaan Pertama:

$$Y1 = PY1 X1 + PY1 X2 + \epsilon 1$$

2. Persamaan Kedua

$$Y2 = PY2 X1 + PY2 X2 + PY2 Y1 \epsilon 2$$

#### Persamaan Aplikasi

1. Persamaan pertama  $Y_2 = \beta_{Y_2X_1} + \beta_{Y_2Y_1} + e$
2. Persamaan Kedua  $Y_2 = \beta_{Y_2X_2} + \beta_{Y_2Y_1} + e$
3. Persamaan Ketiga  $Y_1 = \beta_{Y_1X_1} + e$
4. Persamaan Empat  $Y_1 = \beta_{Y_1X_2} + e$

#### Keterangan:

$Y_1$  = Belanja Modal

$Y_2$  = Pertumbuhan Ekonomi

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Alokasi Umum

Analisis jalur (Path Analysis) didukung oleh uji mediasi. Dimana uji mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara. Dengan syarat sebagai berikut:

$P_1 < P_2 \times P_3$  atau pengaruh langsung  $<$  pengaruh tidak langsung maka  $H_a$  diterima

$P_1 > P_2 \times P_3$  atau pengaruh langsung  $>$  pengaruh tidak langsung maka  $H_a$  ditolak

Agar dapat mengetahui kelayakan model analisis jalur maka akan dilakukan dengan uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah estimasi jalur yang dilakukan benar-benar layak dipakai atau tidak layak untuk digunakan. Dalam uji asumsi klasik yang digunakan dimetode ini yaitu:

#### 1. Uji Normalitas Data

Bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Dengan dasar bahwa uji t dan uji F diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal dan apabila asumsi ini dilanggar maka model regresi ini dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada dan kurva yang menggambarkan distribusi normal yaitu kurva yang berbentuk simetris.

### a. Analisis Grafik

- **Histogram**

Yang menggambarkan variabel terikat sebagai sumbu vertikal sedangkan nilai residual terstandarisasi oleh sumbu horizontal dengan beberapa kriteria yaitu:

- Apabila garis membentuk lonceng dengan miring ke kiri maka tidak berdistribusi normal.
- Apabila garis membentuk lonceng dan di tengah maka data berdistribusi normal.
- Apabila garis membentuk lonceng dengan miring ke arah kanan maka data dinyatakan berdistribusi normal

- **Normal Probability Plot (Normal P-P Plot)**

Dilakukan dengan cara membandingkan distribusi kumulatif dari data sebenarnya. Dengan berdistribusi kumulatif dari distribusi normal dan data digambarkan dengan plotting pada gambar. Dan ada dua kriteria dalam normal probability plot yaitu:

- Apabila titik data sebenarnya menyebar berada di sekitar garis diagonal maka data dinyatakan berdistribusi normal.
- Apabila data sesungguhnya menyebar berada jauh dari garis diagonal maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dan uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation faktor (VIF) oleh hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Ada beberapa penyebab multikolinieritas yaitu:

- a. Konsep variabel ekonomi saling terkait, dimana kenaikan satu variabel ekonomi yang berdampak pada variabel ekonomi lainnya sehingga dapat menyebabkan multikolinieritas.
- b. Penggunaan observasi yang jumlahnya relative kecil

- c. Penggunaan nilai lag dalam model regresi
- d. Dengan adanya kesalahan spesifikasi model dan dimana peneliti tidak tepat memilih salah satu variabel yang sebenarnya tidak terjadi multikolinieritas.

Dengan kriteria sebagai berikut:

$R^2_{X1.X2}$  dan  $R^2_{X2.X1} \leq R^2_{YX1X2}$  maka dinyatakan tidak terjadinya multikolinieritas

$R^2_{X1.X2}$  dan  $R^2_{X2.X1} \geq R^2_{YX1X2}$  maka dinyatakan ada terjadinya multikolinieritas

### 3. Uji Autokorelasi

Digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode  $t$  dengan periode yang sebelumnya. Uji Autokorelasi hanya dilakukan dengan data time series dan tidak perlu dilakukan dengan data cross section. Uji Autokorelasi tujuannya menguji untuk apakah sdalam suatu model regresi linear terdapat korelasi dari kesalahan pengganggu pada periode  $t$  pada kesalahan periode  $t - 1$  dari sebelumnya maka terjadi korelasi yang dinamakan terdapatnya masalah autokorelasi .Pengujian Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan 2 metode akan tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 metode yaitu:

#### a. Uji Durbin Watson (DW Test)

Menggunakan uji Run Test dimana data observasi di atas 100 data. Lebih baik menggunakan uji Lagrange Multiplier. Adapun cara untuk mengatasi masalah autokorelasi dengan melakukan mentransformasikan data atau dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum atau generalized difference equation dan bisa juga dengan memasukkan variabel lag dari variabel

terikatnya yang menjadi salah satu variabel bebasnya dan membuat data observasinya menjadi berkurang.

Dari hasil diagram jalur pada dua persamaan struktural dipembahasan kerangka konseptual, bahwa dimana X1 maupun X2 merupakan variabel dari eksogen, dan untuk Y1 maupun Y2 ini merupakan variabel endogen tersebut. Dan adapun dua persamaan yaitu:

Persamaan 1 :

$$Y1 = \beta_{Y1X1}X1 + \beta_{Y1X2}X2 + e_1$$

Persamaan 2 :

$$Y2 = \beta_{Y2X1}X1 + \beta_{Y2X2}X2 + \beta_{Y2Y1}Y1 + e_2$$

Dalam menggunakan metode path analysis terdapat pengujian yang menggunakan uji mediasi dengan sobel tes. Dengan pengujian ini merupakan makna (*test of significance*) yaitu setiap koefisien jalur yang telah dihitung baik, secara sendiri-sendiri ataupun dalam bersamaan dengan menguji perbedaan dari besarnya pengaruh oleh variabel masing-masing. Pengujian mediasi ini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Hipotesis statistik
  - Ho :  $\beta_{x_u x_i} = 0$ , dimana tidak terdapat pengaruh variabel eksogenus terhadap variabel endogenus.
  - H1 :  $\beta_{x_u x_i} \neq 0$ , dimana terdapat pengaruh variabel eksogenus terhadap variabel endogenus.
- Uji statistik yang tepat dengan menggunakan pengujian koefisien jalur di setiap menguji, adapun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$t = \frac{p_{xuxi}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{xu(x_1 x_2 \dots x_k)}) C_{ii}}{n - k - 1}}}$$

Keterangan:

$i : 1, 2, \dots, k$

$k$  : banyaknya variabel eksogenus dalam substruktur yang sedang diuji

$\dagger$  : mengikuti tabel distribusi  $\dagger$  dengan derajat bebas =  $n - k - 1$

Dengan kriteria pengujian yaitu:

Ditolak  $H_0$  jika nilai hitung  $\dagger >$  nilai tabel  $\dagger$  atau  $\dagger_0 > \dagger_{\text{tabel}(n-k-1)}$ .

- Uji statistik koefisien jalur secara keseluruhan atau bersamaan dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{(n - k - 1)(R^2_{xu(x_1^2 x_2^2 \dots x_k^2)})}{k(1 - R^2_{xu(x_1^2 x_2^2 \dots x_k^2)})}$$

Keterangan:

$i : 1, 2, \dots, k$

$k$  : banyaknya variabel eksogenus dalam substruktur yang sedang di uji

$\dagger$  : mengikuti tabel distribusi F dengan derajat bebas  $k$ , dan  $n - k - 1$ .

Dengan kriteria:

Ditolak  $H_0$  jika nilai hitung  $F >$  dari nilai tabel F atau  $F_0 > F_{\text{tabel}(k, n-k-1)}$

- Menguji perbedaan dari besarnya pengaruh masing-masing variabel.

Dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{p_{xuxi} - p_{xuj}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{xu(x_1 x_2 \dots x_k)}) (C_{ii} + C_{jj} - 2 C_{ij})}{n - k - 1}}}$$

dengan kriteria sebagai berikut:

Ditolak  $H_0$  jika nilai hitung  $\dagger >$  nilai tabel  $\dagger$  atau  $\dagger_0 > \dagger_{\text{tabel}(n-k-1)}$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Perkembangan Sumatera Utara**

Dimasa pemerintahan Belanda yang memegang kekuasaan di Sumatera Utara adalah Gouvernement Van Sumatera, dimana wilayah yang di pegangnya yaitu seluruh pulau Sumatera yang dipimpin dengan Gubernur kota Medan. Setelah terjadinya kemerdekaan pada sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND) Provinsi Sumatera Utara terbagi atas beberapa provinsi sebagai berikut:

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Tengah
3. Sumatera Selatan

Sumatera Utara ini adalah gabungan dari tiga administratif adalah Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948 dan ditetapkan bahwa Sumatera Utara terbagi tiga provinsi masing-masing, dan berhak untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Baik itu provinsi Sumatera utara, Sumatera Tengah, maupun Sumatera Selatan, dengan selanjutnya ditetapkanlah tanggal 15 April 1948 adalah hari jadi Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Diawal tahun 1948 diadakannya reorganisasi pemerintahan di Sumatera Utara dengan Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Nomor 22/Pem/PDRI ditanggal 17 Mei 1949 dengan jabatan Gubernur Sumatera Utara dihapuskan dan selanjutnya, ada ketetapan Pemerintah Darurat R.I oleh tanggal 17

Desember 1949 dan dibentuk Provinsi Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 lalu ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara tersebut. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 dengan diundangkan tanggal 7 Desember 1956 lalu dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah Aceh tersebut.

Letak geografis untuk Sumatera Utara terletak berupa  $1^{\circ}$  -  $4^{\circ}$  Lintang Utara dengan  $98^{\circ}$  -  $100^{\circ}$  bujur timur dengan luas daratan 72.981,23 km<sup>2</sup> di Provinsi Sumatera Utara. Pada dasarnya Sumatera Utara di bagi atas beberapa bagian yaitu Pesisir Timur, Pengunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat dan Kepulauan Nias. Wilayah yang paling besar perkembangannya adalah Pesisir Timur, yang disebabkan karena persyaratan infrastruktur yang relatif lengkap dari pada wilayah lainnya yang ada di sekitar daerah tersebut. Pesisir Timur juga memiliki kepadatan penduduknya dibandingkan dengan wilayah lainnyadan dimasa colonial Hindia Belanda. Pesisir Timur juga termasuk “*residentie sumatera's oostkust*” dengan provinsi Riau yang bersamanya.

Untuk wilayah tengah yaitu provinsi berjajar Pengunungan Bukit Barisan terdapat wilayah yang menjadi kantong fokus penduduk di daerah sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir. Wilayah ini juga memiliki penduduk yang banyak yang dimana akan menggantungkan hidupnya pada Danau Toba dan Pulau Samosir tersebut. Wilayah Pesisir Barat adalah daerah yang cukup sempit ditambah lagi perpaduan jumlah penduduknya berasal dari masyarakat Minangkabau, Aceh dan

Batak. Untuk kulturnya dan etnolinguistik daerah tersebut termasuk dalam budaya maupun bahasa Minangkabau tersebut.

Adapun batasan wilayah untuk batasan Utara terdiri dari provinsi Aceh dan Selat Malaka, sedangkan batasan Wilayah Timur terdiri dari Selat Malaka. Batasan wilayah Selatan terdiri dari provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia. Untuk yang terakhir batasan wilayah Barat terdiri dari provinsi Aceh dan Samudera Indoensia. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 419 pulau, dimana pulau-pulau tersebut di luar dari pulau Simuk dan pulau Berhala. Kepulauan Nias adalah pulau utama dan pulau kecillainnya di sekitar wilayah tersebut. Dengan terletak pada Pesisir Barat di Samudera Hindia dan pada pusat Pemerintahan yang terletak di daerah Gunung Sitoli ini. Pulau Batu mempunyai 51 pulau diantaranya ada 4 pulau besar, yaitu pulau Pini, Sibulasi, Tanahmasa dan Tanahbala. Sumatera Utara mempunyai dua jenis taman nasional, yaitu Taman Nasional Batang Gadis dan Taman Nasional Gunung Leuser.

Suku bangsa di Sumatera Utara terdiri dari Suku Batak, Melayu, Nias, Siladang ini merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Sedangkan untuk penghuni Pesisir Timur itu diduduki oleh orang melayu. Lalu Pantai Barat dihuni oleh suku Barus sampai suku Natal. Dengan dibukanya perkebunan Tembakau pada daerah Sumatera Timur banyak yang datang unt menjadi kuli untuk bekerja di perkebunan tembakau tersebut. Pekerja atau kuli itu berasal dari etnis Tionghoa, arab, india dan juga dari etnis Jawa. Untuk merantau dan mencari kehidupan yang lebih layak di Sumatera Utara. Pada tahun 2010, berdasarkan sensus ada rata-rata penduduk di Sumatera Utara ialah Batak, Nias, Melayu, Minang, Banjar, Tionghoa, India dan Aceh. Masalah bahasa penduduk Sumatera

Utara menggunakan bahasa Indonesia dan juga Melayu. Karena lebih hampir sama kata-katanya dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga digunakan didaerah Pesisir Timur seperti wilayah Serdang Berdagai, Batu Bara, Tanjung Balai, Asahan Dan Pangkalan Dodek.

Wilayah Medan kebanyakan orang Tionghoanya menggunakan bahasa Hokkien ketika mereka ketemu sesama suku mereka, namun kalau mereka berbicara dengan masyarakat lain di luar suku mereka maka mereka menggunakan bahasa Indonesia. begitu juga dengan suku India mereka menggunakan bahasa Tamil. Lalu kalau masyarakat di daerah pengunungan rata-rata masyarakat sana menggunakan bahasa Batak. Sedangkan orang Nias menggunakan bahasa Nias dan untuk daerah Pesisir Barat mereka menggunakan bahasa Pesisir selain menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan Agama di Sumatera Utara lebih banyak menganut agama Islam, di bandingkan agama lainnya. Adapun sensus yang dilakukan pada tahun 2015, kebanyakan penduduk Sumatera Utara menganut agama Islam sebesar 63.91%, untuk Kristen Katolik sebesar 5.41%, lalu agama Konghucu sebesar 0.02 %, sedangkan Buddha 2.43%, agama Kristen Protestan sebesar 27.86%, Parmalim sebesar 0.01 %, dan yang terakhir ada agama Hindu sebesar 0.35%.

## **2. Perekonomian Di Sumatera Utara**

Pada umumnya Sumatera Utara memiliki kaya akan Sumber daya alam minyak bumi yang ada di pangkalan Brandan yang telah dieksplorasi pada Zaman Pemeritah Hindia Belanda yang masih memegang kekuasaan. Sedangkan untuk wilayah Tandam merupakan sumber daya alam berupa gas. Di Kuala Tanjung

terdapat PT. Inalum yang ada di Kabupaten Asahan. PT. Inalum bergerak di bidang penambangan bijih dan sebagai bidang peleburan aluminium.

Danau Toba adalah sumber daya alam yang cukup besar, dimana Danau Toba ini mampu untuk dieksploitasi sebagai pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari air Danau Toba. Untuk wilayah Toba Samosir sendiri memiliki PLTA Asahan yang terbesar di Sumatera Utara. Di daerah kawasan pengunungan ada banyak titik-titik panas geothermal, dimana titik-titik tersebut mampu menjadi potensi yang menghasilkan sumber energy panas maupun sumber energy uap untuk dijadikan energi pembangkit listrik di daerah tersebut. Untuk pertanian dan perkebunan Sumatera Utara memiliki luas perkebunan yang cukup luas. Sehingga menjadi sorotan dalam perekonomian provinsi Sumatera Utara. Dimana perkebunan tersebut dipegang oleh perusahaan swasta, dan Negara. Adapun perkebunan tersebut diberi nama PT. Perkebunan Nusantara II, III dan PT. Perkebunan Nusantara IV. PTPN ini menghasilkan tembakau, kopi, sawit, coklat, karet, kelapa, kayu manis, teh dan juga cengkih. PTPN ini tersebar di daerah Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Simalungun, Asahan, Langkat dan Deli Serdang.

Perkebunan Sumatera Utara telah menghasilkan produk berupa kelapa sawit, teh, kopi, cengkih, kayu manis, tembakau, karet, dan coklat. Hasil produk tersebut diekspor ke berbagai daerah Negara, agar mendapatkan sumbangan devisa yang cukup besar untuk Indonesia berkembang. Sumatera utara juga sebagai wilayah penghasil hortikultura seperti tomat, jeruk, wortel, kentang, sayur kol, dan jambu. Dimana produk hortikultura ini di hasilkan dari Kabupaten Tapanuli, Simalungun dan Karo.

Untuk mengenai sarana dan prasarana pemerintah Sumatera Utara telah membangun berbagai macam prasarana maupun infrastruktur, agar memperlancar perdagangan antar provinsi ataupun kabupaten dan akses kegiatan sehari-hari masyarakat. Pihak sektor swasta juga telah membuka berbagai property untuk perdagangan, hotel dan perkantoran maupun yang lainnya. Untuk sektor lainnya yang terkait mereka membuka usaha koperasi, pos, industri, pertambangan, energi, transmigrasi, telekomunikasi dan pariwisata maupun sektor sosial masyarakat lainnya. Sehingga ini memudahkan koordinasi pembangunan.

## **B. Hasil Penelitian**

Ada dua variabel bebas dan dua variabel terikat, dimana variabel bebas tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Untuk variabel terikatnya terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal. Disini akan dilihat faktor variabel bebas mana yang berpengaruh terhadap variabel terikat, apakah ada pengaruh langsung Pertumbuhan Ekonomi atau melalui mediasi dari Belanja modal.

### **1. Deskriptif Penelitian**

Dalam statistik deskriptif penelitian, ada empat variabel yang akan diuji dimana terdiri dari 2 variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum). Sedangkan untuk variabel terikatnya terdiri dari dua variabel yang dimana ( $Y_1 = \text{Belanja Modal}$ ) dan ( $Y_2 = \text{Pertumbuhan Ekonomi}$ ). Adapun tabel yang disajikan untuk menjelaskan dari hasil penelitian dalam bentuk Statistik Deskriptif pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif**  
Descriptive Statistic

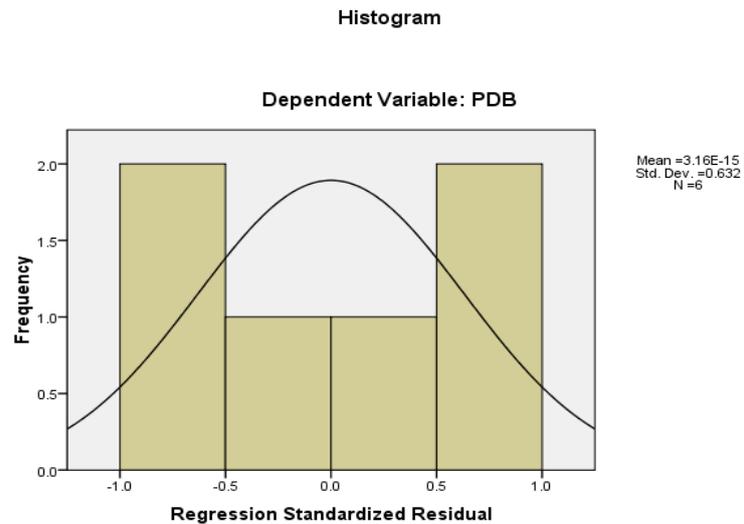
		Std. Deviation	N
	4.82	.529	6
	1.76	.692	6
	283.10	439.756	6
	602.80	101.679	6

*Sumber : Hasil pengelolaan ( SPSS versi 16.0 : 2019)*

Berdasarkan hasil dari pengelolaan data pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai Mean pada Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 4.82. sedangkan nilai Std. Deviation sebesar 0.529 dengan nilai banyaknya data (N) sebesar 6 tahun. Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata sebesar 1.76 dimana nilai Std. Deviation sebesar 0.692 dengan banyaknya data 6 tahun. Nilai Mean pada Belanja Modal memiliki nilai sebesar 283.10 yang dimana nilai Std. Deviation sebesar 439.756 dengan banyaknya data 6 tahun. Dan yang terakhir Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai rata-rata sebesar 602.80 yang Std. Daviation sebesar 101.679 dengan menggunakan data 6 tahun banyaknya. Dimana data tersebut nilai mean lebih besar dibandingkan nilai Std. Deviation, maka data berdistribusi normal.

## 2. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengganggu atau residual memiliki berdistribusi yang normal. Dengan dasar bahwa uji t dan uji f diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal dan apabila asumsi dilanggar, maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Dan kurva yang menggambarkan distribusi normal yaitu kurva yang berbentuk simetris.

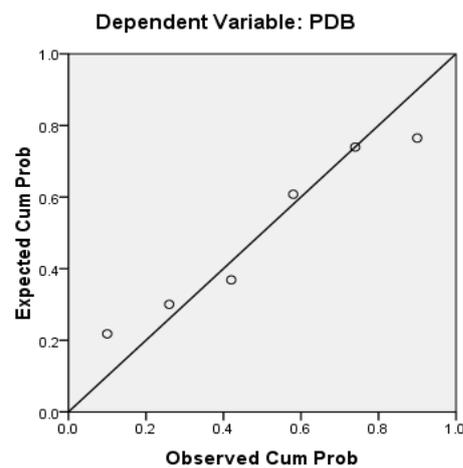


**Gambar 4.1 Grafik Histogram**

*Sumber : Hasil pengelolaan (SPSS versi 16.0 : 2019)*

Dari gambar grafik diatas menunjukkan bahwa garis pada grafik tersebut membentuk lonceng dan berada pada titik 0 dan berada ditengah maka data dinyatakan berdistribusi normal.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**Gambar 4.2 Kurva Normal Probability Plot**

*Sumber : Hasil Pengelolaan (SPSS versi 16.0 : 2019)*

Dari hasil gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada data P-P plot berada menyebar di sekitar garis diagonal dengan ini maka data dinyatakan berdistribusi normal.

### 3. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dan uji ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation faktor (VIF).

**Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-94.783	84.822		-1.117	.345					
PAD	121.198	21.263	.630	5.700	.011	.942	.957	.443	.494	2.023
DAU	64.387	16.248	.438	3.963	.029	.886	.916	.308	.494	2.023

a. Dependent Variable:  
PDB

**Sumber : Hasil Pengelolaan (SPSS versi 16.0 : 2019)**

Nilai tolerance pada Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,494 > 0,5$  dan nilai VIF sebesar  $2,023 < 5$ . Sedangkan nilai tolerance pada Dana Alokasi Umum sebesar  $0,494 > 0,5$  dengan nilai VIF sebesar  $2,023 < 5$ . Maka data dinyatakan berdistribusi normal.

#### 4. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.991 <sup>a</sup>	.982	.970	17.67408	.982	81.242	2	3	.002	1.362

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: PDB

**Sumber : Hasil Pengelolaan (SPSS versi 16.0 : 2019)**

Dari hasil pengelolaan uji autokorelasi pada tiga variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi, terdapat nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,362 yang berada di antara 1-3 maka data dinyatakan terbebas dari masalah Autokorelasi.

#### 5. Uji Analisis Jalur

**Tabel 4.4 Hasil Persamaan Aplikasi 1**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.963 <sup>a</sup>	.928	.880	35.17573

a. Predictors: (Constant), BM, PAD

**Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)**

Pada tabel diatas nilai R pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,963.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-167.564	163.850		-1.023	.382
	PENDAPATANASLIDAE RAH	162.917	32.828	.847	4.963	.000
	BELANJAMODAL	-.052	.039	-.224	-1.312	.000

a. Dependent Variable: PERTUMBUHANEKONOMI

**Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)**

Tabel di atas menunjukkan hasil Beta pada Pendapatan Asli daerah sebesar 0,847 terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan untuk Belanja Modal memiliki nilai Beta sebesar -0,224 terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**Tabel 4.5 Hasil Persamaan Aplikasi 2**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 <sup>a</sup>	.786	.643	60.78364

a. Predictors: (Constant), BELANJAMODAL, DANAALOKASIUMUM

**Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16 :2019)**

Dari hasil pengelolaan persamaan 2 dimana terdapat nilai R pada Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal sebesar 0,886 terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	374.827	110.649		3.388	.043
	DANAALOKASIUMU M	129.515	51.794	.881	2.501	.000
	BELANJAMODAL	-.002	.081	-.008	-.022	.000

a. Dependent Variable: PERTUMBUHANEKONOMI

*Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16 : 2019)*

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai Beta sebesar 0,881 terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan untuk Belanja Modal memiliki nilai Beta sebesar -0,008 terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**Tabel 4.6 Hasil Persamaan Aplikasi 3**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.423 <sup>a</sup>	.179	-.027	445.61643

a. Predictors: (Constant), PENDAPATANASLIDAERAH

*Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16 : 2019)*

Tabel di atas menunjukkan persamaan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang memiliki nilai R sebesar 0,423.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1976.536	1825.332		1.083	.340
	PENDAPATANASLIDAE RAH	-351.440	376.926	-.423	-.932	.000

a. Dependent Variable: BELANJAMODAL

**Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)**

Tabel di atas menunjukkan Nilai Beta pada Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,423 terhadap Belanja Modal.

**Tabel 4.7 Hasil Persamaan Aplikasi 4**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.652 <sup>a</sup>	.425	.281	372.92965

a. Predictors: (Constant), DANAALOKASIUMUM

**Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)**

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai R pada Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal sebesar 0,652.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1013.702	451.633		2.245	.088
	DANAALOKASIUMUM	-414.163	241.034	-.652	-1.718	.000

a. Dependent Variable: BELANJAMODAL

**Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)**

Pada tabel diatas Dana Alokasi Umum memiliki nilai Beta sebesar -0,652 terhadap Belanja Modal.

**Tabel 4.8 Hasil Persamaan Pertama**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.423 <sup>a</sup>	.179	-.027	445.62825

a. Predictors: (Constant), PAD

*Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)*

dari hasil tabel persamaan satu Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal diatas diketahui bahwa nilai R pada tabel tersebut sebesar 0,423 dan sedangkan nilai R Square sebesar 0,179.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1976.563	1825.380		1.083	.340
	PAD	-351.449	376.936	-.423	-.932	.000

a. Dependent Variable: BM

*Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)*

Pada tabel coefficients dari hasil persamaan pertama Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal diketahui bahwa nilai Standardized Coefficients beta sebesar -0,423 dan nilai sig sebesar 0,404.

**Tabel 4.9 Hasil Persamaan Pertama**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.963 <sup>a</sup>	.928	.880	35.17622

a. Predictors: (Constant), BM, PAD

*Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)*

Dari hasil persamaan pertama Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi diketahui bahwa nilai R sebesar 0,963 dan untuk nilai R Square sebesar 0,928.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-167.568	163.851		-1.023	.382
	PAD	162.917	32.828	.847	4.963	.000
	BM	-.052	.039	-.224	-1.312	.000

a. Dependent Variable: PDB

**Sumber: Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)**

Dari hasil pengolahan Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, nilai beta pendapatan asli daerah sebesar 0,847 dengan nilai sig sebesar 0,016. Sedangkan belanja modal memiliki nilai beta sebesar -0,224 dan untuk nilai signya sebesar 0,281.

**Tabel 4.10 Persamaan Kedua**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.652 <sup>a</sup>	.425	.281	372.95065

a. Predictors: (Constant), DAU

**Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)**

dari hasil olahan data persamaan kedua Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal terdapat model summary nilai R sebesar 0,652, sedangkan untuk nilai R Square sebesar 0,425.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1013.677	451.658		2.244	.088
	DAU	-414.157	241.048	-.652	-1.718	.000

a. Dependent Variable: BM

*Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)*

Pada persamaan kedua Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal terdapat nilai beta sebesar -0,652 dengan nilai sig sebesar 0,161.

**Tabel 4.11 Persamaan Kedua**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 <sup>a</sup>	.786	.643	60.78360

a. Predictors: (Constant), BM, DAU

*Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)*

Berdasarkan hasil dari persamaan kedua Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan menggunakan tabel model summary diatas memiliki nilai R sebesar 0,886 dan sedangkan nilai R Squarenya sebesar 0,786.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	374.834	110.644		3.388	.043
	DAU	129.512	51.792	.881	2.501	.000
	BM	-.002	.081	-.008	-.022	.000

a. Dependent Variable: PDB

*Sumber : Data diolah (SPSS Versi 16.0 : 2019)*

Dari hasil olahan data persamaan kedua Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan tabel Coefficients pada nilai Beta untuk dana alokasi umum sebesar 0,881 dengan sig sebesar 0,000. Sedangkan untuk nilai Beta pada Belanja modal sebesar -0,000 dengan nilai sig sebesar 0,984.

Untuk bisa membuktikan bahwa variabel belanja modal dapat menjadi variabel intervening/mediasi antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dihitung pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsungnya pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana bila pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melalui belanja modal bisa dinyatakan belanja modal bahwa dapat menjadi variabel mediasi antara pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Agar dapat melakukan perhitungan secara langsung maupun tidak langsung bisa dilakukan dengan nilai *standardized coefficients regresi* dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut.

Dengan mengetahui bagaimana adanya pengaruh pendapatan asli daerah melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan metode path analysis dengan besarnya nilai dari error variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun cara menghitung dari nilai error tersebut yaitu sebagai berikut:

$$Pe_1 = \sqrt{1 - (0,423)^2} = 0,906$$

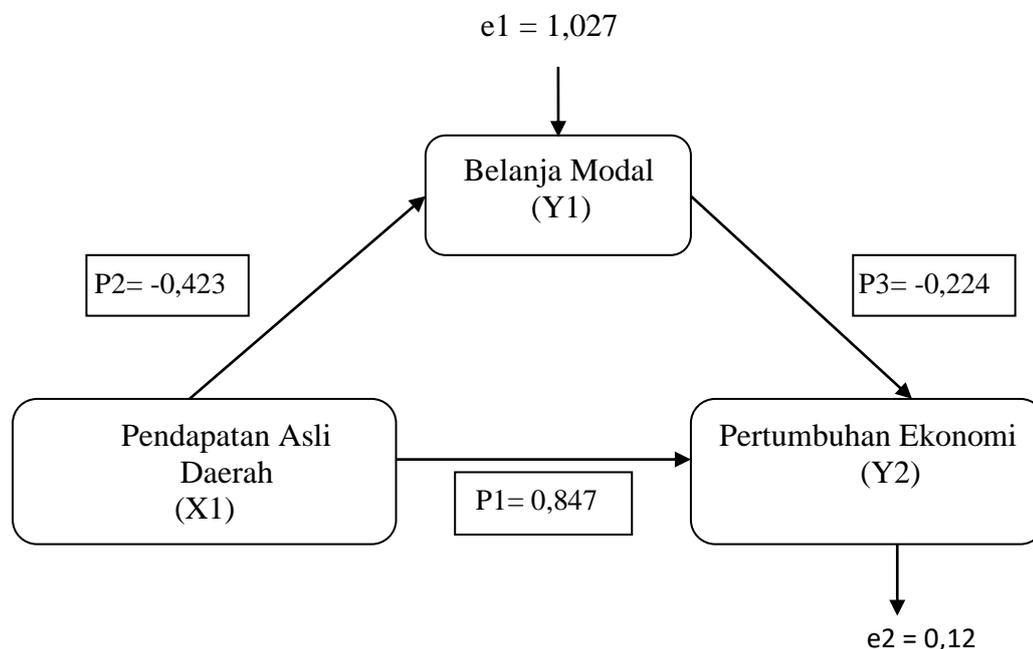
$$Pe_2 = \sqrt{1 - (0,963)^2} = 0,269$$

Dan untuk pengujian validitas pada model riset bisa diamati dengan hitungan koefisien determinasi total dibawah ini:

$$\begin{aligned}
 R^2M &= 1 - P^2e_1 \times P^2e_2 \\
 &= 1 - (0,906)^2 (0,269)^2 \\
 &= 1 - (0,820) (0,072) \\
 &= 1 - 0,05 \\
 &= 0,95 = 95\%
 \end{aligned}$$

Untuk nilai dari koefisien determinasi sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa 95% informasi yang terdapat pada data bisa dijelaskan oleh model dan sedangkan untuk sisanya sebesar 5% akan dijelaskan dari error maupun variabel lainnya yang diluar model tersebut, sedangkan untuk koefisien model ini lebih besar dan layak untuk dilakukan interpretasi selanjutnya. Dari hasil pengolahan data yang menggunakan aplikasi SPSS terdapat nilai Standardized Beta pada pendapatan asli daerah sebesar -0,423 dengan signifikan sebesar 0,000 yang berarti pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal dan nilai koefisien Standardized Beta -0,423 ini adalah hasil dari nilai path analysis atau analisis jalur. Pada hasil persamaan pertama pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai Standardized Beta untuk pendapatan asli daerah sebesar 0,847 dengan signifikan sebesar 0,000, sedangkan untuk nilai belanja modal sebesar -0,224 dengan sig sebesar 0,000 semuanya signifikan. Pada nilai Standardized Beta pendapatan asli daerah sebesar 0,847 ini adalah nilai jalur dari path analysis P1, sedangkan untuk nilai Standardized Beta belanja modal -0,224 ini adalah jalur path analysis P3 dan untuk besarnya nilai dari  $e_1 = 1 - (-0,027) = 1,027$ . Sedangkan untuk  $e_2 = 1 - (0,880) = 0,12$

### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening



**Gambar 4.3 Path Analysis Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil penelitian dari gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah ke Belanja Modal (sebagai variabel intervening), lalu ke Pertumbuhan Ekonomi.

- Besarnya pengaruh **langsung** Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $P_1$ ) = 0,847
- Besarnya pengaruh **tidak langsung** Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal yaitu ( $P_2 \times P_3$ ) ( $-0,423 \times -0,224$ ) = 0,094

- Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung)  $(0,847 + 0,094) = 0,941$
- Kesimpulan dari nilai total sebagai pengaruh mediasi, lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

**Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan:**

Besarnya nilai pengaruh langsung ( $P1$ ) = 0,847 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung ( $P2 \times P3$ ) = 0,0947 maka  $H_a$  ditolak, yang artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, tetapi tidak melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening dan dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka Belanja Modal tidak berfungsi sebagai variabel intervening. penelitian ini sama seperti hasil penelitian Azhari (2019), yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya pendapatan asli daerah maka akan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah dari potensi daerah yang diambil dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Terdapat besarnya nilai error dari pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, yang diperoleh dari perhitungan berikut ini:

$$Pe_1 = \sqrt{1 - 0,652^2} = 0,758$$

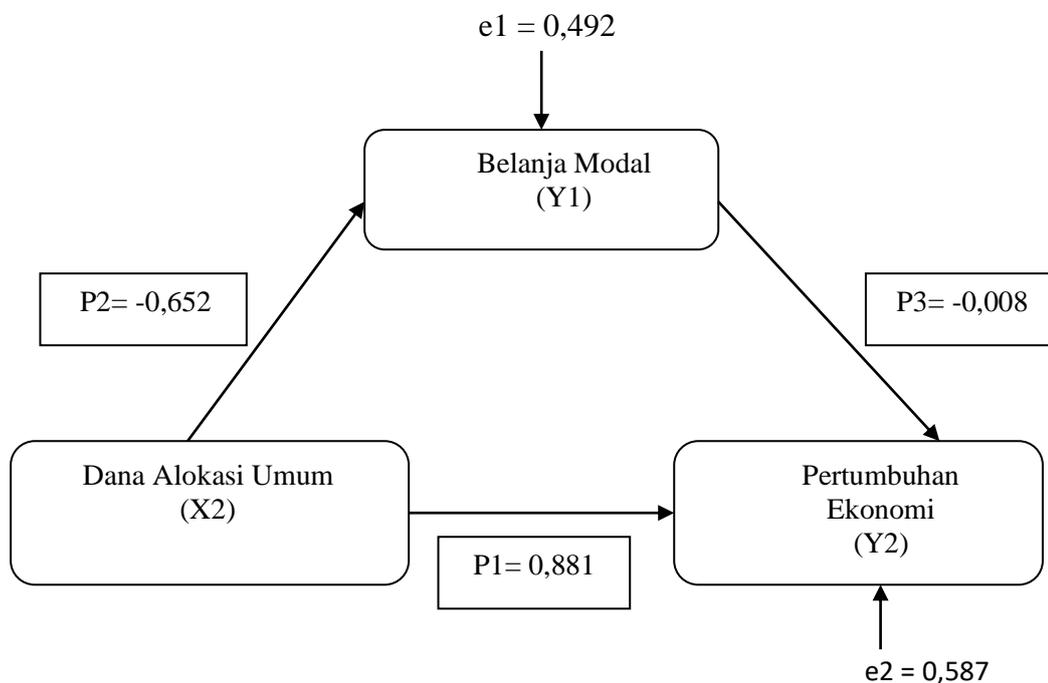
$$Pe_2 = \sqrt{1 - 0,886^2} = 0,463$$

Dengan pengujian validitas pada model riset yang diambil melalui hitungan koefisien determinasi total yakni adalah:

$$\begin{aligned} R^2M &= 1 - P^2e_1 \times P^2e_2 \\ &= 1 - (0,758)^2 (0,886)^2 \\ &= 1 - (0,574) (0,784) \\ &= 1 - 0,450 \\ &= 0,55 = 55\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 55% mampu menjelaskan bahwa 55% dari informasi yang terdapat pada data yang dijelaskan dari model tersebut. Dan untuk sisanya sebesar 45% yang dijelaskan pada error maupun diluar variabel lainnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS dari dana alokasi umum memiliki nilai Standardized Beta sebesar -0,652 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 maka dana alokasi umum mempengaruhi belanja modal dan nilai koefisien Standardized Beta -0,652 adalah nilai dari path analysis atau P2. Sedangkan untuk nilai Standardized Beta pada dana alokasi umum sebesar 0,881, untuk nilai belanja modal memiliki nilai sebesar 0,008 dan semuanya signifikan. Nilai Standardized Beta pada dana alokasi umum sebesar 0,881 adalah nilai dari path analysis atau P1. Nilai Standardized Beta pada belanja modal sebesar 0,008 adalah nilai dari path analysis atau P3 dan nilai dari error sebesar  $e_1 = 1 - (0,281) = 0,492$  untuk  $e_2 = 1 - (0,643) = 0,587$ .

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening



**Gambar 4.4 Path Analisis Pengaruh Antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil penelitian pada gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum bisa berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh Dana Alokasi Umum ke Belanja Modal dengan (sebagai variabel intervening) lalu ke Pertumbuhan Ekonomi.

- Besarnya pengaruh **langsung** Dana Alokasi Umum ( $P_1$ ) = 0,881
- Besarnya pengaruh **tidak langsung** Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal yaitu ( $P_2 \times P_3$ ) ( $-0,652 \times -0,008$ ) = 0,005

- Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung)  $(0,881 + 0,005) = 0.886$
- Kesimpulan dari nilai total sebagai pengaruh mediasi, nilai total pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

**Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan:**

Besar nilai pengaruh langsung ( $P1$ ) = 0,881 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung ( $P2 \times P3$ ) = 0.005 maka  $H_0$  ditolak, yang artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara langsung tetapi tidak melalui Belanja Modal yang sebagai variabel intervening. Dengan disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak menjadi variabel memediasi/intervening antara Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi, maka Belanja Modal dinyatakan tidak berfungsi sebagai variabel intervening. hasil penelitian ini sama seperti hasil penelitian Mawarni, dkk (2013), yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena apabila semakin meningkat dana alokasi umum maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, namun pada belanja modal mengalami penurunan, karena pada tahun 2013, 2015 dan 2018 pemerintah lebih menggunakan dana alokasi umum untuk belanja daerah dibandingkan belanja modal.

### C. Pembahasan

APBN atau anggaran pendapatan dan belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (UU APBN 2018), yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima Negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya (1 Januari sampai 31 Desember). Penyusunan APBN Indonesia sendiri dilakukan oleh kementerian keuangan RI yang kemudian disetujui oleh DPR. Tujuan penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Dari rincian APBN, pemerintah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan Negara di tahun anggaran berjalan.

Susunan APBN seiring dengan berjalannya waktu, struktur ataupun postur APBN Indonesia mengalami beberapa perubahan. Postur APBN pada tahun 2018 ini terdiri dari:

- a. Pendapatan Negara, pendapatan negara sendiri dapat diperoleh melalui Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Belanja Negara, dibagi menjadi dua yaitu:
  - Belanja Pemerintah Pusat, meliputi; Belanja K/L (Kementerian dan Lembaga) Belanja Non K/L (Pembayaran bunga utang, subsidi, belanja lain-lain).
  - Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meliputi: Transfer ke Daerah (Dana bagi hasil, dana alokasi umum) Dana Desa
- c. Keseimbangan Primer

- d. Surplus/Defisit Anggaran (Pendapatan Negara – Belanja Negara atau A – B)
- e. Pembiayaan Anggaran meliputi beberapa biaya yaitu : Pembiayaan utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan, Pembiayaan Lainnya.

APBD atau Anggarapn Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah. Tujuan utama dari APDB adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APDB juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah. Dalam mekanisme penyusunan APBD mirip dengan APBN, alur penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- b. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak.
- c. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.

Adapun dalam susunan APBD terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

Pendapatan daerah didapatkan dari:

a) Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)
- Retrebusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

b) Dana Perimbangan

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana Alokasi Khusus

c) Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah

- Pendapatan Hibah

2. Belanja Daereah

Rincian belanja daerah yaitu:

a) Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

- b) Belanja Langsung
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Barang dan Jasa
  - Belanja Modal
- c) Pembiayaan

Tergantung kondisi APBD yang deficit atau surplus (Penerimaan – Belanja). Jika APBD mengalami defisit, maka pemerintah harus membayar kekurangan biaya tersebut. Sedangkan jika terjadi surplus, maka pemerintah akan menerima kembali dana lebih tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan suatu daerah untuk mencapai suatu kesejahteraan daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 2017 hanya 5,07 persen dari target 5,2 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 52 persen pada tahun 2017. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2017 yang hanya sebesar 5,19 persen.

Dalam pembahasan ini, peneliti sengaja membatasi pada variable pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Bagaimana pengaruhnya karena terdapat beberapa peneliti yang menghasilkan penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh Negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara peneliti lainnya mengatakan positif dan sebagian lagi menyatakan positif dan negatif.

## **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini juga kuat dengan riset yang dilakukan oleh Prawira (2018), yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dimana semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli daerah bersumber dari potensi daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Hal ini akan membuat pendapatan asli daerah bisa meningkat dan bisa juga menurun yang diakibatkan dari faktor pendapatan ekonomi ataupun potensi ekonomi.

## **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Alokasi Umum berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini sama dengan hasil riset dari Maryati dan Endrawati (2010), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini disebabkan karena nilai tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah akan menyebabkan semakin meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi di daerah. Tentu ini menyebabkan peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan yang digunakan dalam membiayai dana kebutuhan daerah tersebut. Dengan ini setiap dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah akan digunakan untuk belanja daerah salah satunya menjadi belanja modal.

### **3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening**

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tidak melalui belanja modal. Hal ini sama dengan riset Azhari (2019), yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, karena pemerintah daerah sebaiknya harus menggali potensi kekayaan daerahnya tersebut. Dengan begitu maka daerah tersebut akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tinggi, selain itu sumber pendapatan asli daerah dapat digunakan sebagai dana untuk membiayai belanja modalnya sendiri. Tentu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tinggi maka semakin besar upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh suatu daerah yang nantinya semakin besar juga kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuatnya.

### **4. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening**

Dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal tidak berpengaruh menjadi variabel intervening/mediasi diantara pengaruh dana alokasi umum dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sama seperti hasil riset Mawarni, dkk (2013), yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negative terhadap belanja modal dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena nilai tinggi dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah akan menyebabkan semakin meningkatnya nilai pertumbuhan ekonomi di daerah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam analisis data dapat dikembangkan menjadi kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dimana memiliki nilai pengaruh langsung sebesar 0,847 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 maka pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah yang bersumber dari potensi daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Tentu ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara langsung.
2. Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Dana Alokasi Umum yang memiliki nilai pengaruh langsung sebesar 0,881 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dimana dana alokasi umum disebabkan dari adanya penting dalam mendanai belanja daerah untuk daerah tersebut. dengan ini setiap dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk belanja daerahnya sendiri dan menjadikan salah satunya sebagai belanja modal.

3. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang melalui belanja modal. Memiliki nilai pengaruh langsung sebesar 0,847 dengan nilai signifikan sebesar 0,000, sedangkan nilai pengaruh tidak langsungnya yang berasal dari  $P_2 \times P_3$   $(-0,432 \times -0,224) = 0,094$  lebih kecil dibandingkan nilai pengaruh langsung. Dan nilai mediasi belanja modal yang berasal dari pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung sebesar 0,941. Maka pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang melalui mediasi. Yang dimana belanja modal tidak berfungsi sebagai variabel intervening/mediasi. Karena pendapatan asli daerah pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dari Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi yang melalui belanja modal, memiliki nilai dana alokasi umum secara langsung sebesar 0,881 dengan nilai sig 0,000. Sedangkan nilai pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,005 yang dimana nilai mediasi belanja modal sebesar 0,886. Maka dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang melalui belanja modal. Dengan ini belanja modal tidak berfungsi sebagai variabel intervening/mediasi. Karena dana alokasi umum berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan hasil penelitian tersebut. Adapun beberapa saran dari penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk meningkatkan belanja modal maka pemerintah sebaiknya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan meningkatkan pendapatan Asli daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, keuangan daerah, retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan lain-lain asli daerah yang sah dan hasil kekayaan alam yang dipisahkan.
2. Sebaiknya dana alokasi umum dapat diminimalisirkan maka pemerintah daerah diharapkan agar lebih bisa menggali potensi kekayaan daerahnya sendiri, tentu hal ini akan membuat daerah tersebut tidak ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah.
3. Pemerintah sebaiknya meningkatkan Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur, jalan ataupun investasi jangka panjang dengan meningkatkan penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerahnya sendiri. Dan menciptakan inovasi baru dalam penggunaan APBD agar provinsi Sumatera Utara.
4. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel tambahan lainnya yang masih banyak dapat dibuat penelitian kedepannya untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Dan tidak terfokus penelitian pada variabel ini saja.
5. Ada baiknya jika penelitian ini ditambah tahunnya mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2019, mungkin akan membuat hasil penelitian

berpengaruh dalam pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal.

6. Ada baiknya jika pemerintah daerah membuat kebijakan pada kabupaten/kota di Sumatera utara dalam skala lebih utama pada pembangunan fisik, yang dianggarkan oleh belanja modal daerah tersebut, khususnya provinsi Sumatera Utara, tentu akan membuat belanja modal daerah lebih sinkron dari adanya kebijakan penggunaan dana tersebut.
7. Kepada penelitian selanjutnya ada baiknya jika ingin mengambil penelitian mengenai APBD, lebih memahami bagaimana pengelolaan anggaran belanja daerah tersebut di provinsi dan kabupaten manapun. Sebaiknya variabel dalam penelitian ditambah dan dikaitkan dengan indikator dari APBD tersebut dan APBN.
8. Sebaiknya pemerintah daerah membuat regulasi mengenai pengawasan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah, agar dana tersebut tidak disalahgunakan dari instansi terkait.
9. Dan sebaiknya dana alokasi umum dan belanja daerah lebih dipisahkan dalam penggunaannya, agar belanja modal di Sumatera Utara bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di jangka yang panjang.
10. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan data yang pendek dalam pengelolaan yang dimulai tahun 2013 sampai tahun 2018, tentu ini mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Dan sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan waktu yang panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2019). ANALISIS KUALITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PDAM TIRTA WAMPU STABAT. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*, 31(1), 15-21.
- Ahmad, R. (2019). PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MITRA NIAGA SEJATI JAYA-LANGKAT. *JUMANT*, 11(2), 137-146.
- Halim, A., (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi Ketiga. Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dan Iqbal, Muhammad. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Edisi Ketiga.
- Rusiadi, Nur Subianto Dan Rahmat Hidayat, (2016). *Metode Penelitian, Konsep, Kasus Dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel*. Medan: Usu Press 2016.
- Azhari, Wina. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Sosial Sains, Program Studi Akuntansi. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Prawira, Taufiq Muji. (2018). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Medan: Prodi Ekonomi Pembangunan. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Tahar, Afrizal dan Zakiya Maulida. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Prasetyo, Aditya. (2018). *Analisis Flaypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik) Di Provinsi Jawa Tengah Dan Diy*. JAAI, Vol. 8, No. 2. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Maryati, Ulfi Dan Endrawati. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2. Politeknik Negeri Padang.
- Apriana, Dina Dan Suryanto Rudy. *Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatana Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.

- Jaya, Putu Ngurah Panji Kartika Dan Dwiranda A. A. N. B. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Udayana (UNUD). Bali: Indonesia.
- Kholik, K. (2017). THE EFFECT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ON WORK PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. ALFO CITRA ABADI MEDAN.
- Kholik, K. (2018, October). Effect of Self-Efficacy and Locus of Control on Small and Medium Entertainment Small Scale. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 214-225).
- Pakpahan, M. (2018). STRATEGI MEINGKATKAN MINAT BELI ULANG APTEK TERHADAP PRODUK OBAT PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABS MEDAN. JUMANT, 6(1), 49-56.
- Putra, Putu Gde Mahendra, Dan Ulupui I Gusti Ketut Agung. *Pendapatan Asdli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Udayana (UNUD). Bali: Indonesia.
- Rahayu, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kabupaten Langkat. JUMANT, 9(1), 115-132.
- Rahayu, S. (2019). PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA MELALUI KETERAMPILAN PENGOLAHAN WAJIK ANEKA RASA DI DESA KLAMBIR LIMA. JUMANT, 11(2), 155-170.
- Rizky, M. C., & Ardian, N. (2019). ENHANCE EMPLOYEE PERFORMANCE FOR INCREASE WORK MOTIVATION ON UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN. Journal Homepage: <http://ijmr.net.in>, 7(08).
- Robain, W. (2012). Pengaruh pendapatan, bagi hasil, tanggungan keluarga dan religi terhadap pola konsumsi tenaga kependidikan di perguruan Islam al Ulum Terpadu Medan (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Rossanty, Y., & PUTRA NASUTION, M. D. T. (2018). INFORMATION SEARCH AND INTENTIONS TO PURCHASE: THE ROLE OF COUNTRY OF ORIGIN IMAGE, PRODUCT KNOWLEDGE, AND PRODUCT INVOLVEMENT. Journal of Theoretical & Applied Information Technology, 96(10).
- Rossanty, Y., Hasibuan, D., Napitupulu, J., Nasution, M. D. T. P., & Rahim, R. (2018). Composite performance index as decision support method for multi case problem. Int. J. Eng. Technol, 7(2.29), 33-36.
- Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Ario, F. (2018). Consumer Behaviour In Era Millennial. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.

Todaro. M.P, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ke Tiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Edisi 4.

Sebayang, S., Novalina, A., Nasution, A. P., & Panggabean, L. S. R. (2019, April). An Empirical Investigation of The Factors Influencing Village Development: A Confirmatory Factor Analysis. In 2nd Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2018) (pp. 929-940). Atlantis Press.

Sukirno, Sadono. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit FEUI.

Jinghan, M.L. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press. Edisi 3.

Mawarni, Darwanis, Dan Abdullah Syukriy. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)*. Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Volume 2, No 2. Fakultas Ekonomi. Universitas Syiah Kuala.

Widodo, S. (2019). STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN SIKLUS HIDUP PRODUK (PRODUCT LIFE CYCLE). JEpa, 4(1), 84-90.

Widodo, S. (2019). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEBERSIHAN KOTA BINJAI. JUMANT, 11(1), 279-295.

Diambil akses melalui website : ([www.sarjanaku.com](http://www.sarjanaku.com))

Diambil akses melalui website : ([www.studiobelajar.com](http://www.studiobelajar.com))

Diambil akses melalui website : (<https://www.bps.go.id>)

Diambil akses melalui website : (<https://www.djpl.kemenkeu.go.id>)

Diambilaksesmelalui website : (<https://id.wikipedia.org/wiki/sumaterautara#sejarah>)